

INDEKS INTENSITAS KEKERASAN | 2015





Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) merupakan sebuah terobosan dalam sistem informasi yang menyediakan data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini didanai oleh The Korea Trust Fund for Economic and Peacebuilding Transitions dan diimplementasikan sejak 2012 melalui kerjasama antara The Habibie Center, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Bank Dunia.

Sebagai bagian dari program SNPK, saat ini telah dibangun database untuk mencatat seluruh insiden kekerasan yang terjadi di provinsi sasaran secara reguler. Database SNPK adalah milik Kemenko PMK, yang bisa diakses pada www.sn timer-indonesia.com. Database ini mencakup 34 provinsi di Indonesia. Seperti ditunjukkan oleh penelitian-penelitian di bidang konflik sebelumnya, surat kabar lokal di Indonesia merupakan sumber informasi yang paling tepat untuk mengumpulkan data kekerasan secara sistematis dan kontinu. Mengikuti hal itu, SNPK membangun database menggunakan surat kabar lokal di 34 provinsi sasaran, meski sumber-sumber lain juga dipergunakan secara rutin untuk proses verifikasi. Agar analisis data dapat berjalan maksimal, database menggunakan definisi kekerasan secara luas, yaitu: sebuah tindakan yang mengakibatkan dampak fisik secara langsung. Untuk setiap insiden kekerasan, sejumlah variabel kunci dicatat dalam database, termasuk: tanggal dan lokasi kejadian; dampak fisik terhadap manusia dan harta benda; pemicu dan bentuk kekerasan; aktor yang terlibat dan senjata yang digunakan; serta upaya penghentian kekerasan dan hasilnya.

Sebagai bagian dari program, The Habibie Center menyusun Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) untuk memberikan gambaran mengenai pemetaan wilayah-wilayah terjadinya konflik di Indonesia. IIK bermanfaat untuk mengidentifikasi dan memantau insiden kekerasan dari waktu ke waktu, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari berbagai aspek yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, serta diharapkan mendukung segala usaha dalam mengembangkan dan memprioritaskan strategi untuk mengurangi potensi kejadian, dan akhirnya untuk menentukan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Indeks Intensitas Kekerasan : Metodologi

Pengantar

Kekerasan telah menjadi topik bahasan penting dalam kajian perubahan global selama ini, namun indeks yang mengukur kekerasan lebih banyak diterapkan untuk mengukur kondisi suatu kawasan dimana yang menjadi satuan analisis adalah negara. Belum banyak indeks dibangun untuk mengukur intensitas insiden kekerasan di dalam satu negara dengan satuan pengamatan pada tingkat propinsi atau kabupaten/kota. Sebagai salah satu referensi, *US Peace Index* melakukan pemeringkatan indeks untuk melihat wilayah-wilayah negara bagian yang paling tinggi (*most peaceful*) dan rendah (*least peaceful*) tingkat perdamaannya.¹

Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) adalah suatu indeks komposit yang dibangun dengan menggabungkan komponen-komponen utama untuk memberikan suatu ukuran kuantitatif atas intensitas kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan unit analisis pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai usaha yang progresif dan konsultatif, indeks ini akan terus disempurnakan dengan mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan. Indeks ini secara konseptual didorong oleh *The Habibie Center* (THC), Bank Dunia/*The World Bank* dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). Sedangkan pengumpulan data dilakukan oleh Jaringan Riset Indonesia (JRI)² berdasarkan pemberitaan di beberapa media cetak di tingkat lokal dan nasional.³

1. Tujuan penyusunan IIK

Sebagai bagian dari kegiatan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), IIK bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pemetaan wilayah-wilayah terjadinya konflik di Indonesia, dan **tidak** dimaksudkan untuk **memprediksi** terjadinya insiden di suatu daerah. IIK bermanfaat untuk mengidentifikasi dan memantau insiden kekerasan dari waktu ke waktu, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari berbagai aspek yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, serta diharapkan mendukung segala usaha dalam mengembangkan dan memprioritaskan strategi untuk mengurangi potensi kejadian, dan akhirnya untuk menentukan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Seperti yang dilakukan oleh Abasolo (n.d), yang lebih memilih keterpaparan (*exposure*) ketimbang kerentanan (*vulnerability*). Menurutnya, kerentanan merupakan sebuah konsep yang beragam dan berlapis-lapis, dan proses yang dilakukan dalam mengungkap aspek dan lapisan-lapisan tersebut bisa jadi sangat ketat dan menuntut banyak sumber daya (data dan analisa). Menurutnya, kerentanan terhadap kekerasan, suatu konstruk yang sama pentingnya, harus diperlakukan secara terpisah dari intensitas kekerasan, dan bahkan dapat berfungsi sebagai alat pelengkap yang baik untuk intensitas kekerasan. Di sisi lain, keterpaparan

1 Armed Violence Reduction (2014) mencatat di seluruh dunia terdapat 70 usaha pemantauan kriminalitas dan kekerasan (baik yang dipublikasikan maupun yang tidak). Salah satu contoh, *US Peace Index* yang mengukur tingkat kekerasan dengan menggunakan indikator tingkat pembunuhan, tingkat kriminalitas dari kekerasan, tingkat penahanan, jumlah polisi dan senjata ringan.

2 Jaringan Riset Indonesia merupakan pihak yang bekerja untuk Kemendagri RI khusus untuk pengumpulan data dan penyusunan pemutakhiran basis data NVMS.

3 Informasi tentang sumber data dapat dilihat pada <http://www.sn timer-indonesia.com/Methodology/DataSource?lang=ina&randdo=37890b58-85a1-494c-b40e-0f26b16d6989&userid=7125825>.

merupakan konsep teoritis yang terbatas pada beberapa dimensi. Dalam konteks kekerasan, keterpaparan dapat dikurangi menjadi dua dimensi, yaitu (1) frekuensi dan (2) besaran. Frekuensi (*frequency*), sebagai dimensi, memiliki data yang tersedia karena hanya berdasarkan dari jumlah insiden kekerasan. Selanjutnya, data dapat dengan mudah diklasifikasikan dan dikumpulkan karena sistem yang dihasilkan. Demikian juga, besaran (*magnitude*) adalah dimensi yang dapat diukur dengan mudah dalam hal cakupan dan pengolahan data karena diukur melalui dampak (*cost*) yang diakibatkan.

2. Kajian pustaka

2.1 *Global Peace Index/GPI (Institute for economics and peace, 2014)*

GPI mendekati “Perdamaian” dalam bentuk harmoni yang dicapai dengan tidak adanya perang, konflik atau kekerasan atau ketakutan akan hal tersebut. Dalam usaha untuk mengukur kedamaian, GPI mengkaji sejauh mana negara-negara terlibat dalam konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung. GPI juga berusaha untuk mengevaluasi tingkat harmoni atau perselisihan dalam suatu negara; sepuluh indikator digunakan untuk menilai apa yang digambarkan sebagai keselamatan dan keamanan dalam masyarakat. Penegasan adalah bahwa tingkat kejahatan yang rendah, aktivitas teroris dan kekerasan demonstrasi yang minimal, hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga, adegan politik yang stabil dan minimnya populasi yang terlantar atau menjadi pengungsi bisa disamakan dengan kedamaian.

Tujuh indikator lebih lanjut terkait dengan pembangunan militer yang mencerminkan bahwa tingkat militerisasi dan akses pada senjata secara langsung terkait dengan bagaimana kedamaian negara terasa, baik domestik maupun internasional. Data perbandingan antara pengeluaran militer sebagai persentase dari PDB, dengan jumlah petugas layanan bersenjata per kepala yang diukur, seperti kontribusi keuangan untuk misi penjaga perdamaian PBB. Tujuan lain dari GPI adalah untuk mengeksplorasi konsep perdamaian positif. Berbagai penelitian telah mengusulkan bahwa budaya perdamaian mungkin didasarkan pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, partisipasi demokratis, masyarakat yang toleran, komunikasi yang terbuka dan keamanan internasional. Namun, bentuk kaitan ini -antara perdamaian dan penyebabnya- cenderung dianggap, bukan diukur secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, laporan ini meneliti hubungan antara GPI dan banyak langkah-langkah internasional demokrasi, transparansi, pendidikan dan kesejahteraan materi yang dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian ini akhirnya mencoba untuk memahami kepentingan relatif dari berbagai faktor penentu potensial, atau pendorong, yang dapat mempengaruhi penciptaan dan pemeliharaan masyarakat yang damai, baik secara internal maupun eksternal.

The GPI terdiri dari 22 indikator yang mencerminkan adanya ketidakhadiran kekerasan atau ketakutan terhadap kekerasan. Indikator awalnya dipilih dengan bantuan sebuah panel internasional dari ahli independen pada tahun 2007 dan telah ditinjau oleh panel ahli secara tahunan. Semua skor untuk setiap indikator dinormalisasi pada skala 1-5. Keseluruhan nilai komposit dan indeks kemudian dirumuskan dengan menerapkan bobot 60 persen untuk ukuran perdamaian internal dan 40 persen untuk perdamaian eksternal. Bobot telah ditinjau oleh panel penasehat sebelum penyusunan setiap edisi GPI.

2.2 *Conflict Barometer/CB (The Heidelberg, 2011)*

Conflict barometer tidak hanya memperhitungkan intensitas untuk memberi penilaian atas wilayah konflik pada tahun tertentu, tetapi juga menentukan intensitas proses konflik untuk unit politik subnasional. Dengan demikian, memungkinkan untuk melakukan pengukuran dinamika konflik dengan cara yang lebih rinci. Konflik tindakan dan komunikasi, di mana penilaian intensitas didasarkan, dievaluasi dengan menggabungkan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur sarana dan konsekuensi konflik. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan ketepatan, keandalan, dan kemampuan untuk menyediakan informasi tentang konflik.

Konflik politik yang diamati oleh kajian ini adalah perbedaan posisi tentang nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat (item konflik) antara paling sedikit dua aktor yang menentukan dan terlibat langsung, yang dilakukan dengan menggunakan cara di luar prosedur peraturan yang ditetapkan dan mengancam fungsi inti dari negara, dan tatanan internasional, atau usaha untuk mempertahankannya. Aktor konflik bisa berupa individu, negara, organisasi internasional atau aktor non-negara. Aktor konflik kolektif dibedakan satu sama lain melalui kohesi internal mereka dan tujuan bersama secara internal. Seorang aktor dianggap sebagai penentu jika keberadaannya, tindakan, dan komunikasi jauh mengubah praktek setidaknya satu pelaku konflik lainnya yang berkaitan dengan item konflik. Tindakan Konflik adalah tindakan dan komunikasi yang dilakukan oleh aktor konflik dalam konteks konflik politik. Mereka terlibat konflik jika mereka teridentifikasi berada di luar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan konflik dan - mungkin dalam hubungannya dengan langkah-langkah konflik lainnya - jika mereka mengancam tatanan internasional atau fungsi inti negara. Prosedur peraturan didefinisikan sebagai mekanisme pengelolaan konflik yang diterima oleh pelaku konflik. Sedangkan Item Konflik adalah barang materi atau immaterial dikejar oleh aktor konflik.

Dalam mengukur tiga tingkat konflik kekerasan, lima proxy yang digunakan menunjukkan sarana konflik dan konsekuensi. Dimensi sarana meliputi penggunaan senjata dan personel, dimensi konsekuensi jumlah korban, kerusakan, dan pengungsi. Untuk setiap daerah bulan diamati - yaitu untuk setiap bulan kalender di setiap unit politik subnasional tingkat pertama - masing-masing indikator tersebut dinilai dan diberi skor.

CB menggabungkan strategi penelitian kualitatif dan kuantitatif, langkah-langkah konkret berikut ini diambil ketika mengkaji intensitas konflik: Pertama, pengamat konflik mengevaluasi jenis senjata dan cara senjata itu digunakan. Kedua, mengidentifikasi ukuran konflik wilayah-bulan yang dianalisis berdasarkan jumlah tertinggi dari personel yang terlibat. Ketiga, mengevaluasi jumlah keseluruhan korban dalam konflik di wilayah-bulan. Keempat, jumlah kerusakan akibat konflik ditentukan dalam empat dimensi yang dianggap penting bagi penduduk sipil: infrastruktur, akomodasi, ekonomi, dan budaya. Terakhir, mengevaluasi jumlah keseluruhan pengungsi lintas batas dan pengungsi di daerah-bulan. Intensitas wilayah-bulan dihitung untuk menginformasikan tentang intensitas konflik dalam satu tahun kalender pada suatu daerah konflik yang spesifik. Sebuah daerah konflik adalah jumlah semua unit subnasional yang dipengaruhi oleh konflik kekerasan tersebut. Intensitas wilayah-tahun pada dasarnya sama dengan intensitas wilayah-bulan maksimum di daerah-tahun tertentu. Selain itu, intensitas wilayah-tahun dicocokkan dengan melihat angka tahunan dan jenis korban dan pengungsi sebagai dua indikator utama penilaian konflik. Krisis kekerasan dapat ditingkatkan ke tingkat perang terbatas jika ada lebih dari 360 korban atau lebih dari 18.000 pengungsi di sepanjang tahun di daerah konflik. Sebuah perang terbatas dapat ditingkatkan ke tingkat perang jika ada lebih dari 1.080 korban jiwa atau lebih dari 360.000 pengungsi. Sebaliknya, perang terbatas dapat diturunkan menjadi krisis kekerasan jika ada kurang dari 120 korban jiwa dan kurang dari 6.000 pengungsi. Demikian juga, perang dapat diturunkan ke tingkat terbatas perang jika ada kurang dari 360 korban jiwa dan kurang dari 120.000 pengungsi.

2.3 Conflict Vulnerability Analysis Issues (Samarasinghe, Donaldson, & McGinn, 1999)

Publikasi ini melihat konflik sebagai bagian yang inheren dalam kehidupan manusia, sehingga bisa terjadi pada level individu, keluarga, komunitas, masyarakat, hingga negara. Atas dasar itu, kemudian banyak terdengar istilah konflik kolektif yang umumnya berhubungan dengan kelompok-kelompok yang saling berbeda dalam hal kepentingan, nilai, dan aspirasi. Di beberapa kejadian, kelompok-kelompok ini yang dianggap sebagai aktor dengan mengusung isunya masing-masing dalam peristiwa konflik. Samarasinghe dan kawan-kawan juga mendekati konflik melalui analisis kerentanan. Mereka mendasarkan kerentanan konflik pada teori yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab atau situasi awal dari konflik baru, lanjutan, maupun konflik yang berulang.

Kajian Samarasinghe dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ras, etnis, budaya dan agama, serta masalah identitas menjadi faktor-faktor independen “primordial” yang menyebabkan konflik. Semua itu terhubung erat dengan ideologi politik atau dapat dipolitisasi, terutama ketika negara lemah atau dalam tekanan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir faktor lingkungan telah semakin terlihat juga, baik dari segi persaingan atas sumber daya yang semakin langka, termasuk juga efeknya yang dapat merusak lingkungan itu sendiri. Dan dalam kajiannya tersebut mereka membagi tipe konflik (a) Berdasarkan tingkat kekerasan: Peperangan atau konflik dengan intensitas tinggi, dan konflik dengan intensitas rendah; (b) Berdasarkan sifat konflik: Civil War, Pemberontakan, Konflik sosial berkepanjangan, Perang revolusi, dan Perang untuk pemisahan.

Samarasinghe dan kawan-kawan membagi dampak konflik menjadi: (a) Dampak langsung kepada Manusia: Kematian karena kekerasan, tertekan dan penderitaan, migrasi, dan Kerusakan Lingkungan; (b) Dampak terhadap Sosial-Ekonomi: Erosi/degradasi jaringan sosial (sekolah, klinik, dan keluarga), Ketidakstabilan jaringan ekonomi (marketing dan peminjaman/kredit), Degradasi/kerusakan infrastruktur (rumah, transport, dan irigasi), dan Kehilangan human capital (skill dan pengetahuan); (c) Biaya Kesempatan: Hasil kebun/sawah tidak tumbuh, Barang-barang tidak terjual, Skill tidak dipelajari, dan Pembangunan tidak meningkat

2.4 Conducting conflict assessment: Guidance notes (DFID, 2002)

DFID (2002) mengungkapkan bahwa sangat penting untuk menganalisis faktor-faktor jangka panjang yang mendasari konflik kekerasan untuk membuat penilaian kerentanan wilayah terhadap wabah atau intensifikasi konflik. Hal ini melibatkan identifikasi sumber utama ketegangan yang telah menyebabkan, atau cenderung mengakibatkan konflik terbuka. Sehingga dibutuhkan identifikasi atas faktor-faktor yang mendasari konflik, yaitu situasi (1) Faktor keamanan seperti pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan/kelompok bersenjata, warisan konflik masa lalu, dan sistem pengelolaan konflik yang lemah; (2) Faktor politik seperti sistem politik yang kurang dilembagakan/tidak representatif, dan proses pemerintahan, (3) Faktor ekonomi seperti penurunan kondisi perekonomian: tren dalam kemiskinan, pengangguran, keamanan, inflasi bahan makanan, dan kesenjangan ekonomi berdasarkan daerah atau etnis (4) Faktor sosial seperti warisan konflik etnis yang belum terselesaikan, ketegangan bahasa, etnis agama, dan kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa/penurunan legitimasi otoritas adat.

DFID (2002) menyatakan perlunya menentukan aktor penting yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh konflik. Hal ini dapat melengkapi analisis struktural yang terlihat pada faktor-faktor jangka panjang yang mendasari konflik kekerasan- dengan analisis aktor yang berorientasi pada insentif jangka pendek dan kepentingan yang sering menimbulkan konflik laten menjadi konflik terbuka. Yang perlu dikaji atas pelaku konflik diantaranya adalah kepentingan setiap aktor, hubungan antar aktor, kapasitas, agenda perdamaian, dan insentif bagi terciptanya suasana damai. Analisis aktor berorientasi melibatkan analisis insentif dan motivasi individu. Hal ini didasari pendapat bahwa konflik merupakan persepsi dan makna yang diberikan orang (motivasi mereka) pada peristiwa, lembaga, kebijakan, dan seruan untuk mendapat dukungan publik.

Setelah mengidentifikasi faktor pemicu dan aktor yang terlibat, langkah selanjutnya adalah untuk menilai kemungkinan naik turunnya konflik atau akan tetap stabil. Harus juga dikaji tren jangka panjang dan pemicu jangka pendek yang dapat menyebabkan konflik terjadi atau mengubah jalannya konflik. Berdasarkan hal ini, prediksi skenario konflik di masa depan dapat dirumuskan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian tentang tren konflik jangka panjang, pemicu bagi peningkatan konflik, kapasitas untuk menangani konflik, dan skenario kemungkinan konflik di masa depan.

Dalam konteks penyusunan IIK, indikator dipilih dari data yang dikumpulkan oleh lembaga JRI. Terkait dengan isu konflik dan kekerasan, THC memiliki batasan operasional yang selama ini digunakan.⁴ Secara singkat, dalam penyusunan IIK beberapa istilah yang sering muncul didefinisikan sebagai berikut:

3.1 Konflik

Konflik didefinisikan sebagai suatu perebutan menyangkut nilai dan klaim guna mengamankan status, kekuasaan dan sumber daya, suatu perebutan di mana tujuan utama pihak penentang adalah meredam, melukai atau menyingkirkan pihak pesaing (Coser 1956). Dalam IIK, konflik dengan kekerasan dibatasi pada seluruh insiden konflik antar individu dan kelompok yang melibatkan suatu bentuk tindakan fisik yang memiliki dampak kekerasan, seperti korban tewas, korban luka-luka dan kerusakan harta-benda, atau mengambil bentuk kekerasan, seperti perkelahian, meskipun tidak disebut adanya dampak kekerasan (Samarasinghe, Donaldson, & McGinn, 1999; Nyheim, Leonhardt dan Gaigals, 2001; DFID, 2002). Sedangkan dampak dalam bentuk lain, seperti dampak psikologis yang tidak bisa diamati secara fisik, tidak menjadi indikator (Samarasinghe et.al., 2011).

3.2 Tipe Konflik

Dalam Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan, tipe didefinisikan sebagai isu yang diperselisihkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya, tipe insiden yang diperhitungkan dalam IIK terdiri dari:

- Sumber Daya, yakni tindakan kekerasan dipicu oleh sengketa sumber daya (lahan, tambang, akses pekerjaan, gaji, polusi dan lain-lain)
- Pemilihan dan Jabatan, yakni tindakan kekerasan dipicu oleh persaingan antara dua pihak berkaitan dengan pemilihan atau jabatan
- Tata Kelola Pemerintahan, yakni tindakan kekerasan dipicu oleh kebijakan atau program pemerintah (pelayanan publik, korupsi, subsidi, pemekaran dan lain-lain)
- Identitas, yakni tindakan kekerasan dipicu oleh identitas kelompok (agama, etnis, suku dan lain-lain)
- Separatisme, yakni tindakan kekerasan yang dipicu oleh upaya pemisahan dari NKRI
- Main Hakim Sendiri, yakni tindakan kekerasan dipicu oleh masalah belas dendam (tersinggung, pencurian, hutang, kecelakaan dan lain-lain)
- Kekerasan Aparat dalam Bertugas, yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka
- Kriminalitas, Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu.

3.3 Dampak Konflik

Dampak yang dimaksud adalah dampak secara fisik yang terjadi karena insiden konflik atau kriminalitas murni, bukan dampak psikologis atau dampak jangka panjang.

⁴ Penjelasan tentang indikator-indikator awal yang digunakan dapat dilihat dalam *Buku panduan koding dalam Portal* www.snppk-indonesia.com

4. Penyusunan IIK

Mengacu pada yang dilakukan oleh OECD (2008), IIK menempuh beberapa langkah yang terdiri dari:

4.1 Penyusunan kerangka teoritis

Landasan kerangka teoritis adalah tulang punggung penyusunan indikator komposit. Kerangka tersebut yang akan menjelaskan fenomena yang diukur, menjadi dasar dalam menyeleksi indikator-indikator, dan menjadi dasar dalam pembobotan setiap indikator. Idealnya proses ini didasarkan pada apa yang ingin diukur.

Proses penyusunan kerangka teoritis IIK dilakukan melalui 2 kali diskusi sejak tahun 2012 dengan mengundang beberapa pakar dari Kemenkokesra, Bank Dunia, Badan Pusat Statistik (BPS), LIPI, Bappenas, LSM penggiat isu konflik, praktisi, akademisi Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia. Dalam diskusi tersebut, para pakar memberi penekanan pada metode pemilihan indikator dan usulan untuk menggunakan data dari sumber selain data SNPK. Para pakar juga menyajikan berbagai contoh indeks yang ada, termasuk yang mereka susun sebelumnya, seperti Indeks Demokrasi Indonesia.

Dalam diskusi juga dibahas tentang penggunaan istilah “Kekerasan” sebagai nama Indeks yang sedang disusun Tim THC.⁵ Bahasan tersebut terus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin agar IIK bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penyusunannya.

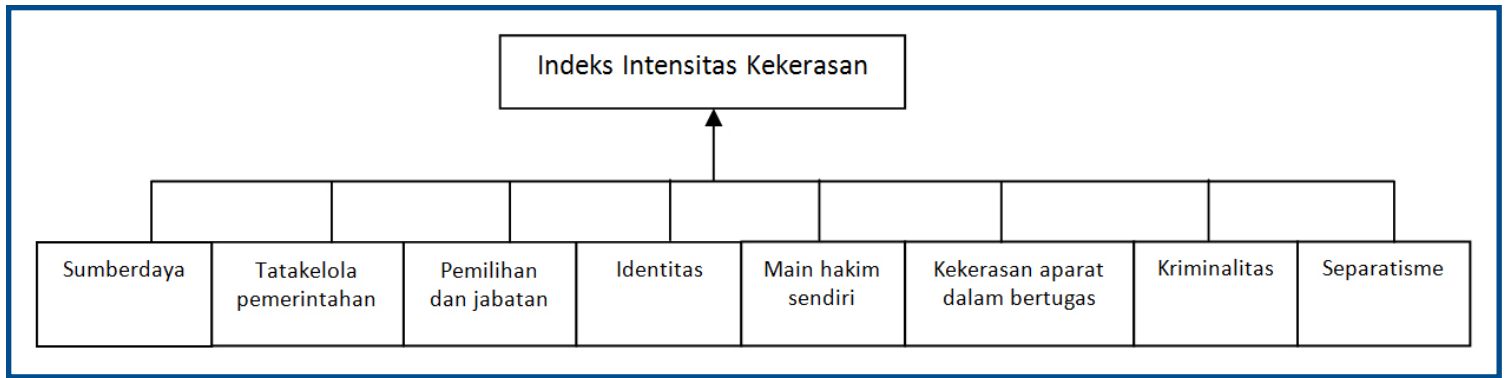
4.2 Konstruksi variabel dan Tranformasi data

Menurut OECD (2008), pembangunan indikator komposit dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait kualitas data dasar yang digunakan dan kekuatan prosedur yang digunakan. Digambarkan dimensi-dimensi yang menjadi acuan adalah:

- **Relevansi.** Merujuk pada kemampuan statistik yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan di masa depan.
- **Akurasi.** Merujuk pada ketepatan penghitungan atau kedekatan estimasi dengan nilai sesungguhnya.
- **Aktualitas dan Ketepatan.** Aktualitas merujuk pada rentang waktu antara penyajian data dengan fenomena yang digambarkannya. Ketepatan merujuk pada rentang waktu antara saat dikeluarkan dengan diterimanya data.
- **Aksesibilitas dan Kejelasan.** Aksesibilitas merujuk pada kondisi fisik dimana pengguna dapat mengakses statistik: distribusi atau ketersediaan dalam berbagai format. Kejelasan merujuk pada bentuk informasi yang disampaikan: grafik dan peta.
- **Interpretability.** Mencerminkan kemudahan pengguna untuk dapat memahami, menggunakan, dan menganalisis data dengan benar. Kecukupan definisi konsep, populasi sasaran, variabel dan terminologi yang mendasari data serta informasi yang menggambarkan keterbatasan data sangat menentukan tingkat *interpretability*.
- **Coherence.** Merujuk pada kecukupan data untuk digabungkan dengan data lain dengan cara dan pemanfaatan yang berbeda.

Dalam menyusun membangun konstruksi variabel, Tim THC melakukan konsultasi intensif dengan para pakar. Konsultasi dilakukan dengan mengacu pada pengalaman pakar dan dengan melihat ketersediaan data SNPK. Dalam perkembangan berikutnya, melalui beberapa diskusi dengan tim memunculkan beberapa indikator yang dianggap mampu mencerminkan intensitas, seperti yang terlihat pada Gambar 1.

5 Meskipun dianggap memiliki citra negatif, istilah “Kekerasan” digunakan dalam indeks yang disusun oleh pihak lain, seperti *Manchester College Peace Studies Institute* menyusun *National Violence Index* (2000)



Gambar 1. Konstruksi variabel

Sebagai suatu kegiatan pemantauan, IIK melakukan pemilihan variabel dan indikator dari data yang tersedia dan bersandar pada justifikasi dari referensi tentang pengukuran konflik dan kekerasan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Terkait dengan variabel yang digunakan, IIK mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Abasolo (n.d) tentang keterpaparan (exposure) yang diwakili oleh variabel Frekuensi insiden dan Dampak. Dalam IIK jumlah insiden dan dampak di-proporsionalisasi dengan jumlah populasi (per 100,000 jiwa penduduk) sebagai variabel yang menggambarkan intensitas kekerasan berdasarkan wilayah (lihat: *Institute for economic and peace*, 2014). Dengan teknik proporsionalisasi, jumlah insiden yang sama akan memiliki makna intensitas yang lebih tinggi jika terjadi di wilayah yang berpenduduk lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah dengan jumlah populasi lebih besar. Kedua variabel dalam IIK melalui proses standardisasi dengan cara membandingkan nilai absolut dari setiap satuan pengamatan (kabupaten/kota, dan propinsi) dengan nilai acuan (standar/benchmark). Nilai acuan diperoleh berdasarkan nilai absolut tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) untuk setiap indikator yang muncul dalam periode pengamatan 2005-2012. Standardisasi nilai diperoleh melalui rumus:

$$\text{Nilai indikator X} = \frac{\text{nilai pengamatan} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$$

Dimana:

- Nilai Pengamatan : nilai absolut indikator X pada unit analisis tertentu (kab/Kota, Propinsi) dalam satu tahun pengamatan
- Nilai Maksimum : jumlah tertinggi indikator X selama periode 2005-2012
- Nilai Minimum : jumlah terendah indikator X selama periode 2005-2012

Dampak dari standardisasi membuat suatu insiden atau dampak yang jumlah absolut kejadiannya lebih besar akan memperoleh nilai yang lebih kecil jika angka pembagiannya (nilai maksimum dikurang nilai minimum) lebih besar. Sebaliknya, insiden/dampak yang jumlah absolutnya lebih kecil akan memiliki nilai yang lebih besar jika angka pembagiannya lebih kecil. *Database SNPK* menunjukkan nilai maksimum untuk setiap indikator sebagai berikut:

**Tabel 1. Nilai maksimum berdasarkan Tipe dan dampak Konflik
Periode 2005-2012**

Tipe Konflik	Insiden	Tewas	Luka	Rusak
Sumberdaya	1.935	28	185	1.764
Tatakelola Pemerintahan	53	7	116	78
Pemilihan dan Jabatan	167	19	129	137
Identitas	72	42	510	510
Main Hakim Sendiri	546	25	957	173
Kekerasan Aparat dalam Bertugas	441	43	226	6
Kriminalitas	1.383	156	795	572
Separatisme	1.227	208	147	80
Total	3.586	938	3.928	2.196

4.3 Pembobotan dan Agregasi

Pembobotan akan berdampak signifikan terhadap penentuan IIK. Dalam IIK, pembobotan hanya diterapkan untuk variabel Dampak. Hal ini terkait dengan tujuannya, yaitu mengukur intensitas dari insiden kekerasan. Sedangkan pada variabel frekuensi kejadian tidak dilakukan pembobotan karena 8 Tipe yang menjadi aspek IIK tidak berasal dari sub-aspek dengan jumlah yang setara, misalnya Aspek Identitas merupakan gabungan dari beberapa sub-aspek, sementara aspek Kriminalitas bukan merupakan gabungan/penjumlahan (lihat Lampiran 1).

Teknik pembobotan yang dilakukan dalam penyusunan IIK menggunakan uji statistika *Principle Component Analysis* (PCA) dan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dilakukan bersamaan. Penggunaan AHP dilakukan untuk mengakomodir masukan dari para pakar yang menekankan bahwa jumlah Dampak bukan sekedar angka, terutama dampak Tewas dan Luka, namun juga memiliki dimensi kemanusiaan (humanis). Berdasarkan PCA, diperoleh urutan indikator dan bobot sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Dampak dan Bobotnya berdasarkan PCA

No	Komponen	Bobot
1	Korban Tewas	0.55
2	Korban Luka	0.12
3	Bangunan Rusak	0.06

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dilakukan dengan mengundang penilaian dari pihak-pihak yang berasal dari berbagai latarbelakang, mulai dari aparat birokrasi, praktisi, maupun akademisi. Dengan dibantu oleh program *Expert Choice*®, hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

Synthesis: Summary

Combined instance -- Synthesis with respect to:

Intensitas kekerasan

Overall Inconsistency = ,10



Gambar 2. Bobot variabel dampak hasil AHP

Kedua teknik tersebut menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, terutama dalam hal nilai keutamaan atau urutan pentingnya variabel dampak. Ditunjukkan bahwa Korban Tewas merupakan dampak terpenting, kemudian Korban luka, dan terakhir Bangunan Rusak. Untuk selanjutnya, nilai bobot yang digunakan adalah hasil AHP dimana masing-masing dampak memiliki bobot 0,6 (Korban tewas), 0,3 (Korban luka), dan 0,1 (Bangunan rusak). Selanjutnya, guna mendapatkan nilai yang lebih nyata, maka dalam penghitungan IIK masing-masing bobot dikalikan 10 sehingga nilai bobot untuk masing-masing dampak menjadi:

- Korban tewas: 6
- Korban luka: 3
- Bangunan rusak: 1

4.4 Penyajian data

IIK diharapkan mampu menyampaikan pesan yang baik lengkap kepada para pembuat keputusan atau pengguna lainnya secara cepat dan akurat. Penggunaan grafis dari indeks diharapkan mampu melakukannya tanpa menghilangkan makna dari tiap data yang mendasarinya. Di akhir kegiatan ini, IIK akan disajikan dalam bentuk peta interaktif berbasis *website* yang akan menampilkan bukan hanya peringkat masing-masing wilayah berdasarkan nilai indeks, namun juga menyajikan data/indikator darimana nilai indeks tersebut diperoleh.

5. Agregasi dan penghitungan IIK

Nilai IIK setiap unit analisis dihitung baik secara keseluruhan maupun berdasarkan Tipe Kekerasan (Identitas, Sumberdaya, dan lainnya). Secara umum, Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) untuk masing-masing unit analisis (Kabupaten/Kota dan Propinsi) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IIK} = \text{Insiden} \times (1 + \text{total dampak})$$

Dimana:

Insiden = Jumlah insiden (yang dinormalisasi dan distandarisasi)

Dampak = (Jumlah dampak Tewas x bobot Tewas) + (Jumlah Dampak Luka x bobot Luka) + (Jumlah Bangunan rusak x bobot Rusak)

Rumus di atas juga memiliki makna dimana untuk insiden yang tidak menimbulkan Dampak, nilai IIK sama dengan Nilai Insiden (yang dinormalisasi dan standarisasi). Untuk alasan kesederhanaan (mengurangi jumlah digit namun tidak menghilangkan makna), nilai IIK yang dihasilkan berdasarkan tipe dibagi 10, dan angka IIK total dibagi 100.

6. Kategorisasi nilai IIK

Agar makna dari nilai IIK dapat lebih dipahami, maka nilai IIK dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni: Tinggi, sedang, dan Rendah. Ketiga kategori tersebut ditentukan menggunakan analisis nilai *Percentile* atas nilai IIK tertinggi pada data periode 2005-2012 yang menjadi nilai dasar atau nilai acuan (*benchmark*). Dalam proses penentuan nilai dasar ini ditemukan bahwa sebagian kecil (kurang dari 1%) wilayah pengamatan yang memiliki IIK di atas rata-rata, dan hampir semua wilayah (lebih dari 95%) berada di bawah nilai rata-rata IIK terhitung. Berdasarkan fakta tersebut ditentukan kategori intensitas kekerasan sebagai berikut:

Tabel 3. Penentuan batas kelas

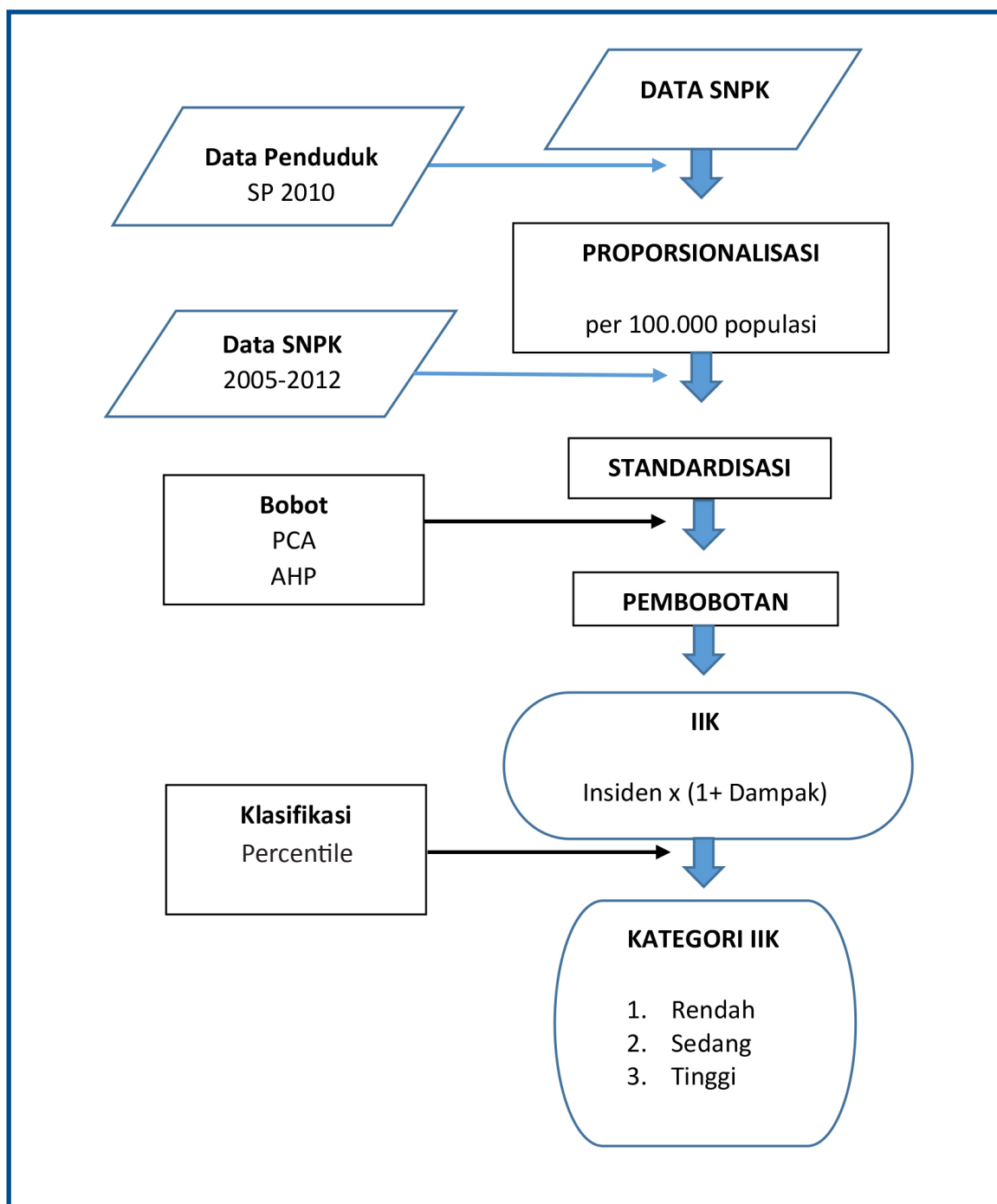
No	Kelas	Jarak Data
1	Rendah	Percentile 0% – 95%
2	Sedang	Percentile > 95% - 99%
3	Tinggi	Percentile > 99%

Berdasarkan penghitungan pada tabel 3 di atas, ditentukan kategorisasi intensitas kekerasan sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi intenstas kekerasan bedasarkan tipe konflik

No	Tipe Konflik	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sumberdaya	< 1,0284	1,0285 – 3,7753	> 3,7753
2	Tatakelola pemerintah	< 13,8778	13,8778 – 47,6182	> 47,6182
3	Pemilihan dan jabatan	< 6,3627	6,3627 – 24,1338	> 24,1338
4	Identitas	< 44,4054	44,4054 – 312,8217	> 312,8217
5	Main hakim sendiri	< 22,6388	22,6388 – 171,5088	> 171,5088
6	Kekerasan aparat	< 4,3082	4,3082 – 14,2462	> 14,2462
7	Kriminalitas	< 119,1838	119,1838 – 564,2900	> 564,2900
8	Separatisme	< 14,0800	14,0800 – 20,3542	> 20,3542
9	IIK	< 6,9574	6,9574 – 25,9256	> 25,9256

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan IIK dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram alur perumusan IIK

7. Aplikasi Indeks

Sebagai simulasi, tulisan ini menggunakan data insiden tahun 2014, dimana SNPK mencatat data kekerasan sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Insiden Kekerasan Menurut Tipe Konflik Tahun 2014

Propinsi	Sumberdaya	Tatakelola Pemerintahan	Pemilihan & Jabatan	Identitas	Main Hakim Sendiri	Kekerasan Aparat	Kriminalitas	Separatisme
ACEH	38	21	89	13	74	30	258	-
BALI	12	4	10	6	47	22	329	-
BANTEN	15	18	6	11	69	82	195	-
BENGKULU	33	9	11	13	96	48	711	-
D I YOGYAKARTA	3	3	15	33	81	21	218	-
DKI JAKARTA	22	8	9	54	303	83	493	-
GORONTALO	7	4	3	4	7	6	102	-
JAMBI	24	7	18	13	42	41	243	-
JAWA BARAT	42	19	22	81	322	149	829	-
JAWA TENGAH	21	13	24	36	203	80	723	-
JAWA TIMUR	61	34	30	34	553	212	1.451	-
KALIMANTAN BARAT	15	5	9	2	41	37	174	-
KALIMANTAN SELATAN	7	2	-	3	70	42	242	-
KALIMANTAN TENGAH	23	3	3	5	86	54	424	-
KALIMANTAN TIMUR	19	12	-	13	150	25	456	-
KALIMANTAN UTARA	1	2	1	1	7	-	48	-
KEP. BANGKA BELITUNG	4	1	-	8	28	19	184	-
KEP. RIAU	22	14	1	3	121	25	379	-

Tabel 5. Jumlah Insiden Kekerasan Menurut Tipe Konflik Tahun 2014

Propinsi	Sumberdaya	Tatakelola Pemerintahan	Pemilihan & Jabatan	Identitas	Main Hakim Sendiri	Kekerasan Aparat	Kriminalitas	Separatisme
LAMPUNG	16	10	6	6	94	87	457	-
MALUKU	29	17	13	35	23	9	141	-
MALUKU UTARA	8	23	14	30	41	15	171	-
NUSA TENGGARA BARAT	21	43	26	42	99	31	352	-
NUSA TENGGARA TIMUR	29	6	16	27	42	12	422	-
PAPUA	56	17	31	26	106	10	986	42
PAPUA BARAT	16	18	12	9	59	10	313	1
RIAU	33	15	9	12	116	63	545	-
SULAWESI BARAT	-	4	3	-	4	4	19	-
SULAWESI SELATAN	37	41	24	120	127	82	673	-
SULAWESI TENGAH	9	30	7	37	23	10	213	-
SULAWESI TENGGARA	14	16	6	15	22	20	133	-
SULAWESI UTARA	26	11	24	60	107	44	1.160	-
SUMATERA BARAT	20	13	1	22	94	28	307	-
SUMATERA SELATAN	47	9	11	17	278	257	1.356	-
SUMATERA UTARA	129	38	22	28	752	180	1.724	-

Tabel 6. Dampak Insiden Kekerasan Menurut Tipe Konflik 2014

Propinsi	Sumberdaya			Tatakelola Pemerintahan			Pemilihan Dan Jabatan			Identitas			Main Hakim Sendiri			Kekerasan Aparat			Kriminalitas			Separatisme		
	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak
ACEH	1	38	3	0	14	4	4	33	30	0	23	3	4	114	2	2	29	1	29	150	16	0	0	0
BALI	3	5	1	0	1	1	0	2	2	0	8	0	0	53	5	0	29	0	17	204	5	0	0	0
BANTEN	2	7	3	0	13	1	0	4	2	2	9	0	6	95	0	5	114	0	46	95	4	0	0	0
BENGKULU	0	14	4	0	9	5	0	8	1	0	12	2	4	133	0	1	49	0	20	456	25	0	0	0
D I YOGYAKARTA	1	5	0	0	1	1	0	7	6	4	82	5	2	85	2	3	27	0	16	117	15	0	0	0
DKI JAKARTA	3	46	0	0	1	1	0	59	1	3	58	26	12	393	1	20	94	0	80	290	14	0	0	0
GORONTALO	0	3	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	9	1	0	8	0	11	67	12	0	0	0
JAMBI	4	23	33	0	7	1	0	5	12	1	20	8	2	51	2	2	40	0	33	140	6	0	0	0
JAWA BARAT	6	38	3	0	37	4	0	38	2	13	69	33	63	366	15	37	188	0	152	379	31	0	0	0
JAWA TENGAH	1	25	2	0	7	0	0	15	1	2	82	5	11	263	6	3	115	0	75	425	32	0	0	0
JAWA TIMUR	6	48	2	0	32	10	0	18	3	3	37	6	28	674	8	37	252	0	159	878	39	0	0	0
KALIMANTAN BARAT	1	7	3	0	6	1	0	10	2	1	8	1	3	53	1	4	44	0	29	87	13	0	0	0
KALIMANTAN SELATAN	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	71	3	2	49	0	63	166	1	0	0	0
KALIMANTAN TENGAH	2	13	6	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	96	0	4	69	0	47	250	15	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR	2	14	1	0	19	2	0	0	0	0	11	0	3	189	10	4	29	0	29	295	11	0	0	0
KALIMANTAN UTARA	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	26	1	0	0	0
KEP. BANGKA BELITUNG	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0	14	0	0	33	0	0	24	1	18	121	4	0	0	0
KEP. RIAU	0	37	53	0	23	3	0	2	0	0	3	1	7	128	1	0	26	0	40	246	8	0	0	0
LAMPUNG	3	16	23	0	11	3	0	6	0	3	11	100	19	92	59	8	90	0	56	213	13	0	0	0
MALUKU	17	117	12	0	4	23	0	15	13	5	35	46	1	26	6	0	7	0	13	88	9	0	0	0

Tabel 6. Dampak Insiden Kekerasan Menurut Tipe Konflik 2014

Propinsi	Sumberdaya			Tatakelola Pemerintahan			Pemilihan Dan Jabatan			Identitas			Main Hakim Sendiri			Kekerasan Aparat			Kriminalitas			Separatisme		
	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak	Tewas	Luka	Rusak
MALUKU UTARA	1	1	0	0	9	9	0	15	2	4	76	15	1	58	3	0	17	0	10	135	12	0	0	0
NUSA TENGGARA BARAT	1	12	9	0	23	10	0	20	13	6	76	17	12	116	14	4	30	0	23	199	26	0	0	0
NUSA TENGGARA TIMUR	7	40	5	0	2	0	0	11	3	0	29	17	3	46	4	3	16	0	34	257	42	0	0	0
PAPUA	22	294	25	0	6	20	2	26	14	12	81	7	13	204	35	0	14	0	60	666	93	34	37	6
PAPUA BARAT	2	30	18	0	6	24	0	19	3	0	10	1	0	95	30	1	14	0	21	225	55	1	0	0
RIAU	7	35	23	0	53	2	0	5	3	2	35	4	6	128	0	4	75	0	55	212	12	0	0	0
SULAWESI BARAT	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	2	10	1	0	0	0
SULAWESI SELATAN	11	14	10	1	59	5	0	10	4	9	141	78	14	136	6	7	95	0	88	377	32	0	0	0
SULAWESI TENGAH	2	4	2	0	21	31	0	3	3	5	8	10	2	21	0	3	8	0	23	130	12	0	0	0
SULAWESI TENGGARA	2	5	5	0	60	4	0	0	0	1	9	1	2	25	1	1	24	0	22	81	7	0	0	0
SULAWESI UTARA	1	27	5	0	4	4	1	13	6	3	108	38	9	120	36	4	45	0	74	844	61	0	0	0
SUMATERA BARAT	3	44	8	0	17	1	0	0	1	1	8	4	3	120	0	1	35	0	22	144	7	0	0	0
SUMATERA SELATAN	12	52	20	0	5	7	0	5	2	1	20	3	31	319	3	22	294	0	202	787	39	0	0	0
SUMATERA UTARA	6	107	30	0	17	6	0	16	4	2	47	5	34	939	9	11	193	0	157	1076	40	0	0	0

Data di atas kemudian di-proporsionalisasi per 100.000 jiwa penduduk dan standarisasi dengan nilai acuan (Tabel 1). Khusus indikator Dampak, dilakukan pembobotan, sehingga diperoleh nilai akhir IIK seperti pada tabel berikut.

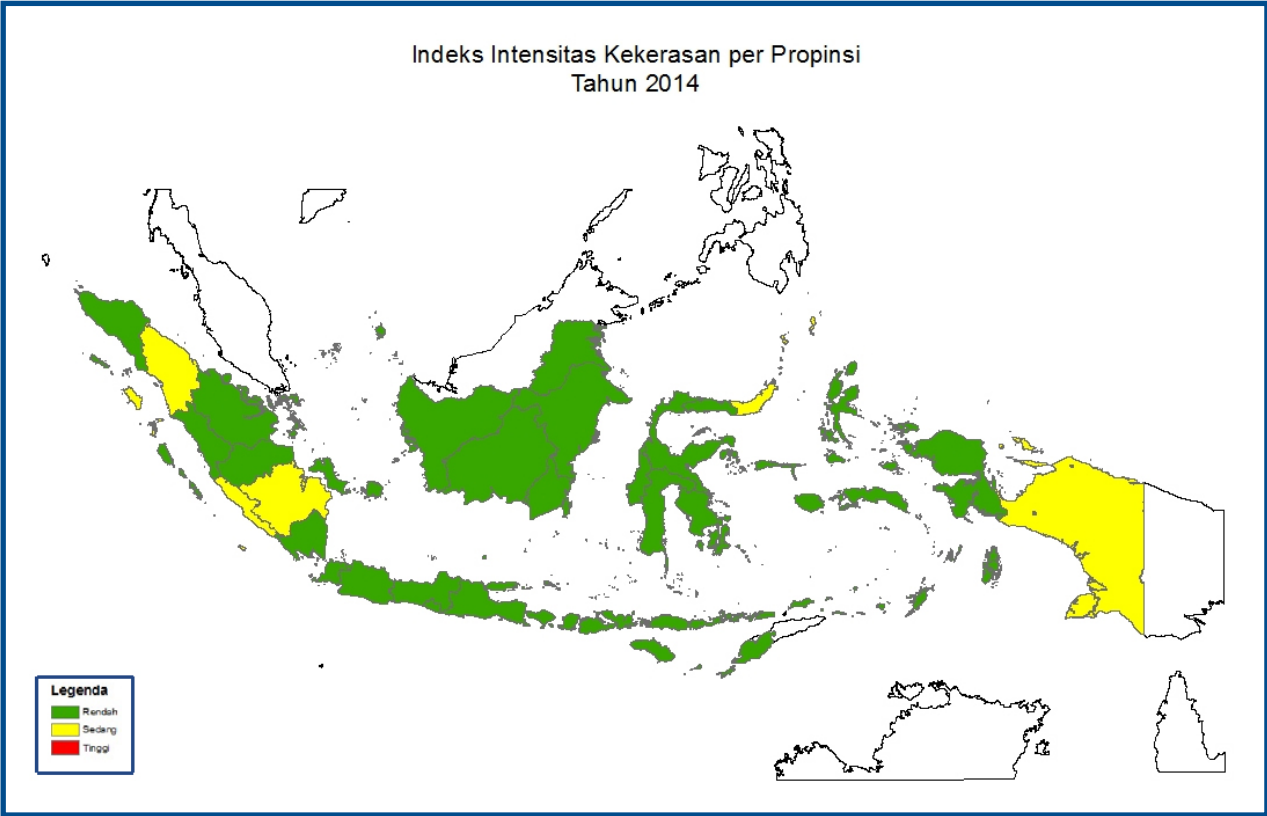
Tabel 7. Nilai Indeks Intensitas Kekerasan Tahun 2014

Propinsi	Indeks per Tipe								IIK
	sumber daya	tatakelola pemerintahan	pemilihan dan jabatan	identitas	main hakim sendiri	kekerasan aparat	kekriminalitas	separatisme	
SULAWESI UTARA	0,39	1,51	4,26	42,25	23,83	5,13	227,65	0,00	19,72
SUMATERA SELATAN	1,12	0,52	0,12	0,88	57,87	54,62	142,36	0,00	19,60
PAPUA	9,75	4,79	8,87	28,35	27,34	0,16	126,22	2,21	16,57
SUMATERA UTARA	1,57	2,91	0,42	1,75	118,73	12,94	97,96	0,00	16,08
BENGKULU	0,24	3,04	0,78	0,89	14,21	5,08	76,23	0,00	7,16
SULAWESI SELATAN	0,64	24,38	0,50	48,70	11,43	5,36	30,41	0,00	5,21
JAWA TIMUR	0,18	1,69	0,22	0,86	24,56	11,17	27,20	0,00	4,98
KEP. RIAU	0,43	10,12	0,02	0,07	27,68	1,20	40,65	0,00	4,64
PAPUA BARAT	1,02	21,12	4,48	1,16	6,84	1,00	52,47	0,00	4,26
DKI JAKARTA	0,17	0,08	0,78	6,48	23,84	7,93	15,60	0,00	3,72
KALIMANTAN TENGAH	0,35	0,16	0,01	0,07	2,21	8,21	38,63	0,00	3,45
JAWA BARAT	0,10	0,85	0,28	6,11	22,42	6,02	10,22	0,00	3,19
NUSA TENGGARA BARAT	0,10	13,26	1,98	17,53	13,48	1,51	9,60	0,00	2,79
LAMPUNG	0,10	0,83	0,07	0,77	11,77	6,02	12,99	0,00	2,77
RIAU	0,64	7,19	0,14	1,53	7,10	4,03	20,96	0,00	2,73
KALIMANTAN TIMUR	0,18	3,36	0,00	0,38	10,67	1,52	20,95	0,00	2,46
MALUKU UTARA	0,10	14,97	3,02	42,46	3,25	0,77	11,02	0,00	2,14
KALIMANTAN SELATAN	0,09	0,01	0,00	0,07	3,43	2,47	14,77	0,00	1,41
NUSA TENGGARA TIMUR	0,70	0,15	0,59	1,72	1,48	0,37	15,47	0,00	1,35
ACEH	0,37	3,73	26,79	0,61	4,04	1,27	7,14	0,00	1,30
JAMBI	0,50	0,87	0,75	1,67	1,65	2,47	10,33	0,00	1,24
SULAWESI TENGAH	0,09	20,42	0,16	15,43	0,89	0,46	8,22	0,00	1,13
MALUKU	5,43	8,54	2,30	32,34	1,01	0,14	5,70	0,00	1,13

Tabel 7. Nilai Indeks Intensitas Kekerasan Tahun 2014

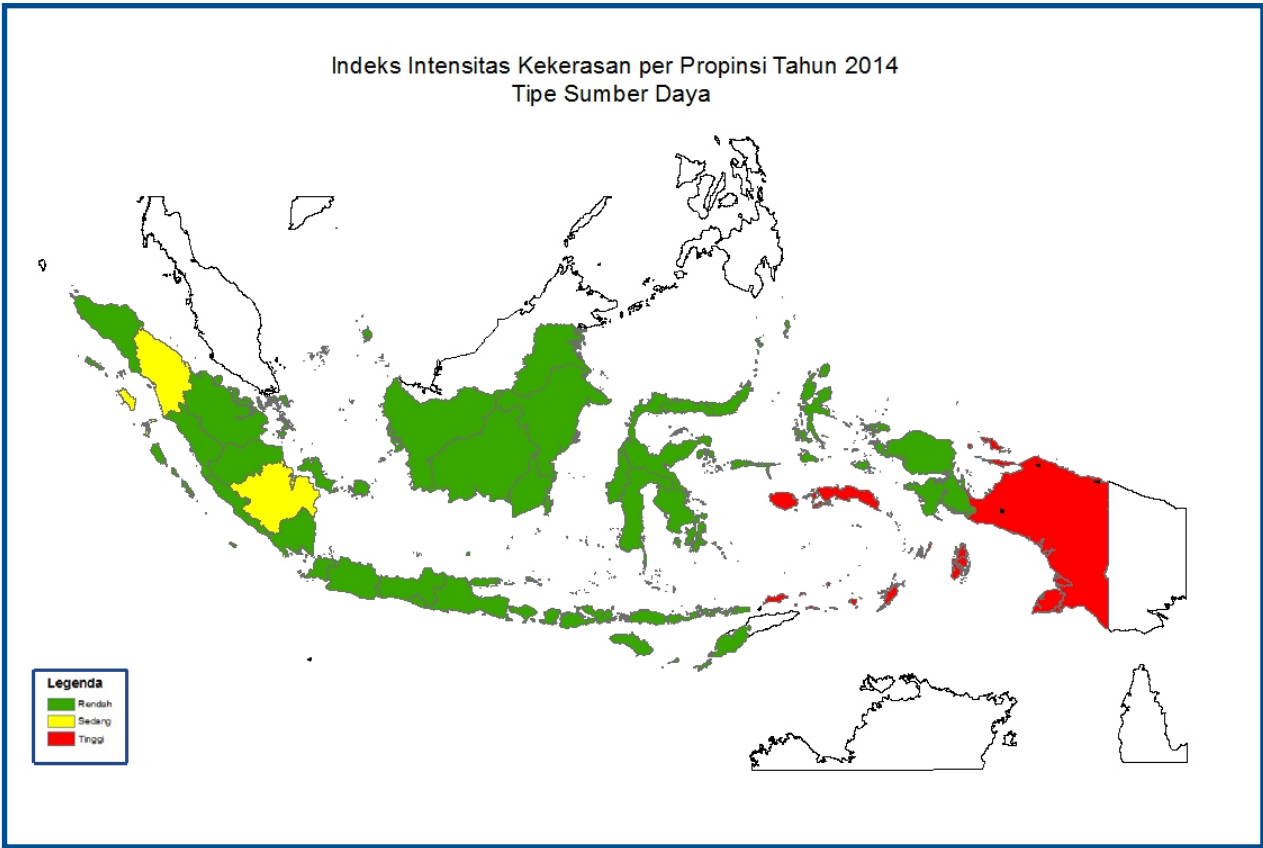
Propinsi	Indeks per Tipe								IIK
	Sumber Daya	Tatakelola Pemerintahan	Pemilihan dan Jabatan	Identitas	Main Hakim Sendiri	Kekerasan Aparat	Kriminalitas	Separatisme	
D I YOGYAKARTA	0,01	0,08	0,56	14,23	3,30	1,08	4,98	0,00	1,11
JAWA TENGAH	0,02	0,15	0,17	1,25	4,12	1,12	7,53	0,00	1,05
KEP. BANGKA BELITUNG	0,01	0,09	0,00	0,84	0,48	1,74	12,68	0,00	1,02
SUMATERA BARAT	0,29	2,34	0,00	1,31	3,93	0,80	6,47	0,00	0,92
SULAWESI TENGGARA	0,17	21,84	0,02	1,94	1,04	0,95	5,06	0,00	0,68
BANTEN	0,04	1,15	0,04	0,50	2,08	3,88	2,84	0,00	0,67
KALIMANTAN BARAT	0,06	0,38	0,32	0,13	1,55	2,21	4,24	0,00	0,67
BALI	0,12	0,09	0,11	0,12	0,45	0,51	8,82	0,00	0,64
GORONTALO	0,02	0,82	0,56	0,08	0,05	0,15	5,01	0,00	0,30
KALIMANTAN UTARA	0,00	0,16	0,04	0,03	0,66	0,00	0,98	0,00	0,13
SULAWESI BARAT	0,00	0,40	0,30	0,00	0,16	0,04	0,15	0,00	0,03

Setelah dilakukan klasifikasi terhadap nilai IIK (mengacu pada Tabel 4), visualisasi dalam bentuk peta terlihat pada gambar berikut :

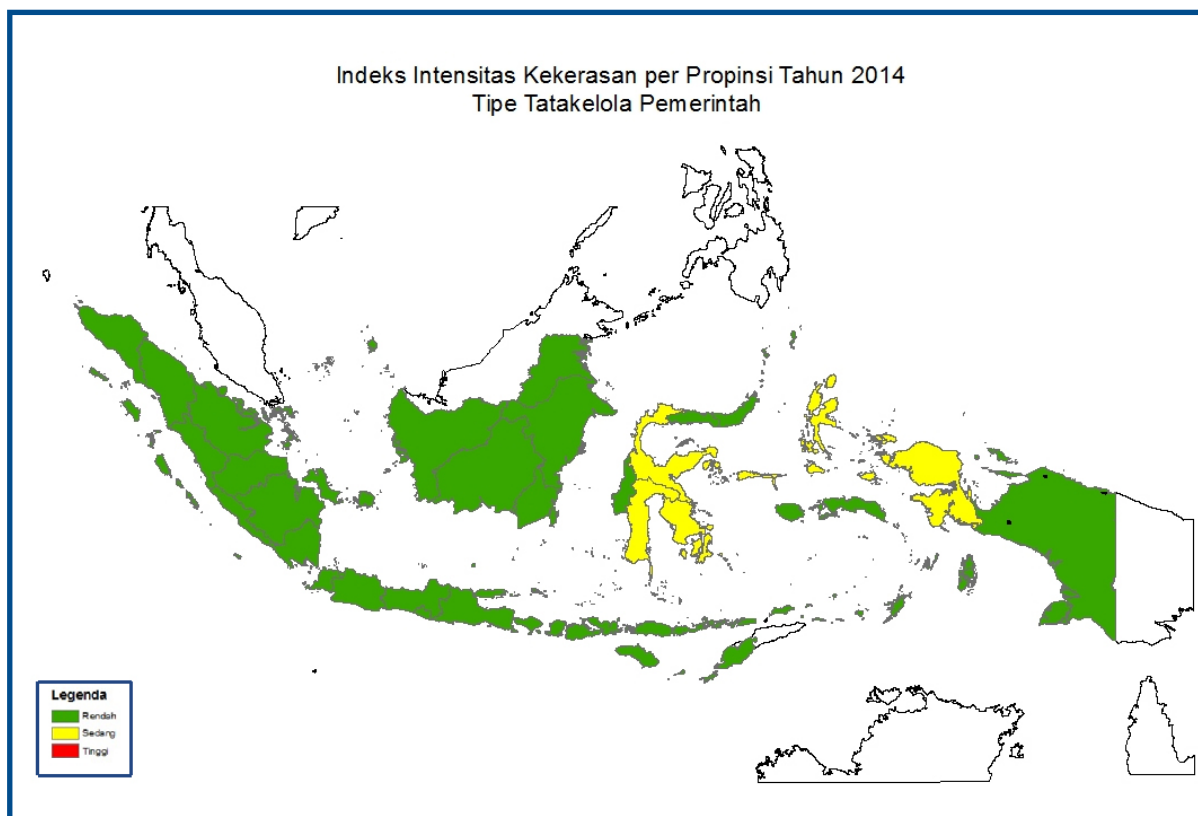


Gambar 6. IIK per propinsi dalam bentuk peta

Berikut adalah contoh visualisasi peta dari nilai IIK berdasarkan tipe kekerasan:



Gambar 7. IIK tipe Sumberdaya per propinsi dalam bentuk peta



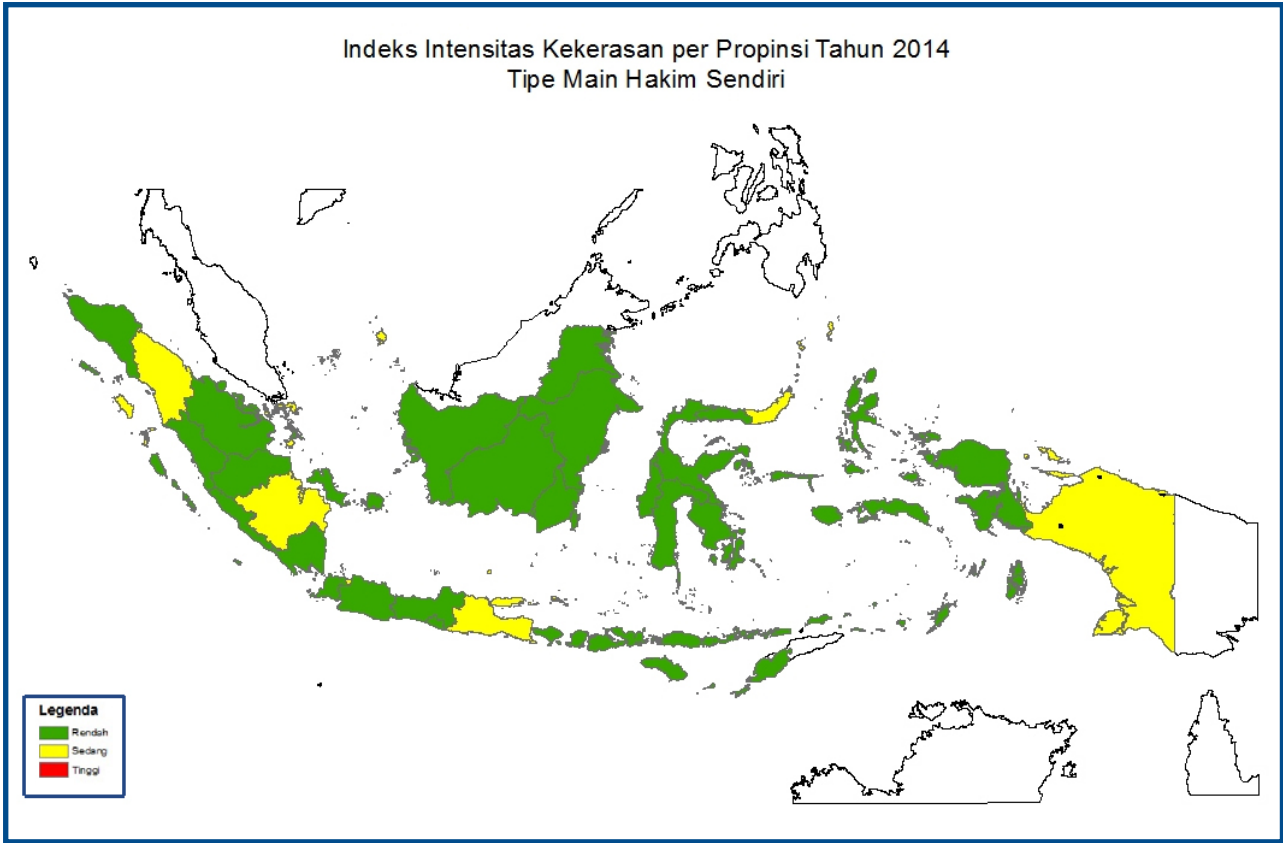
Gambar 8. IIK tipe Tatakelola pemerintahan per propinsi dalam bentuk peta



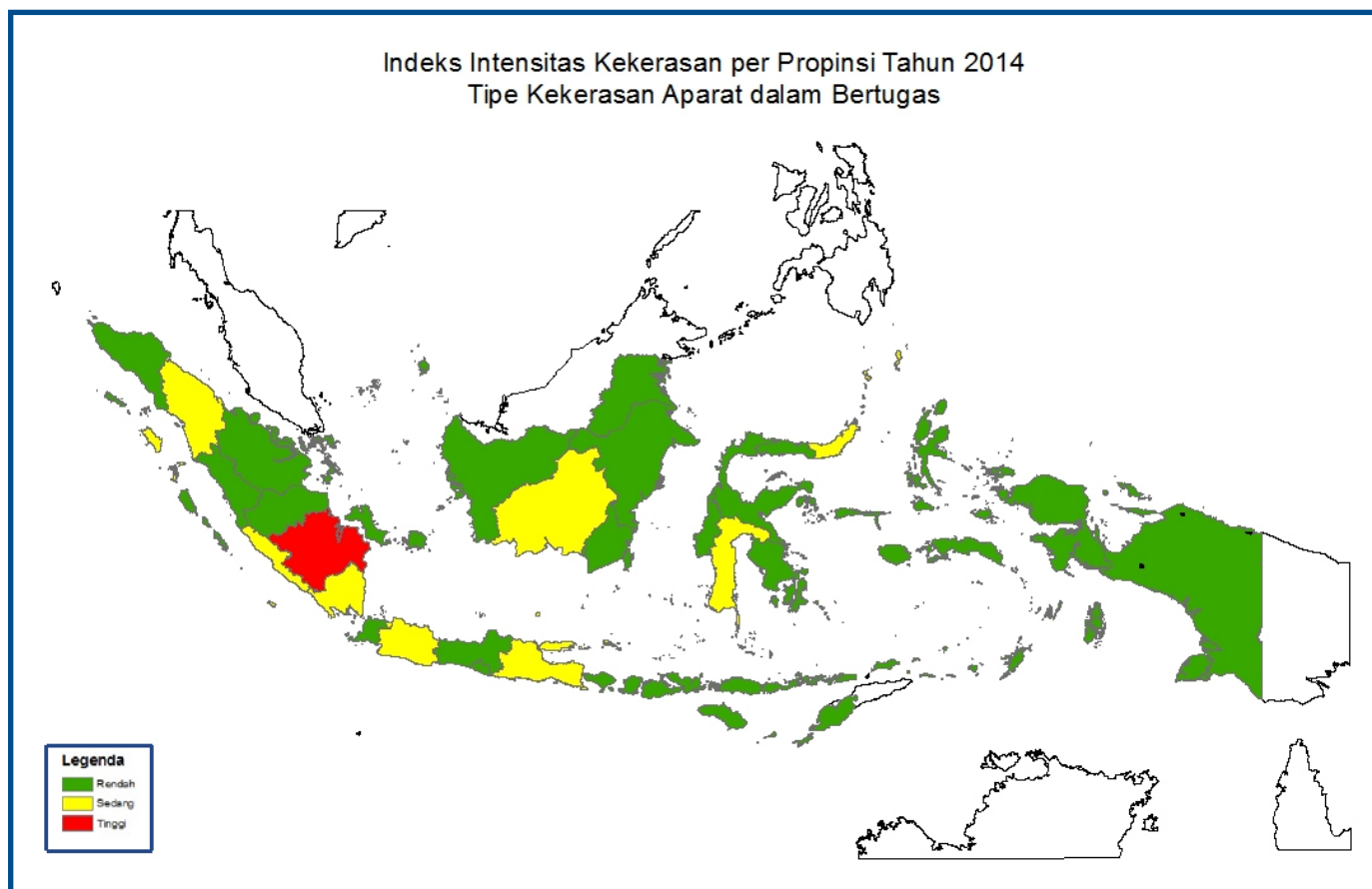
Gambar 9. IIK tipe Pemilihan dan jabatan per propinsi dalam bentuk peta



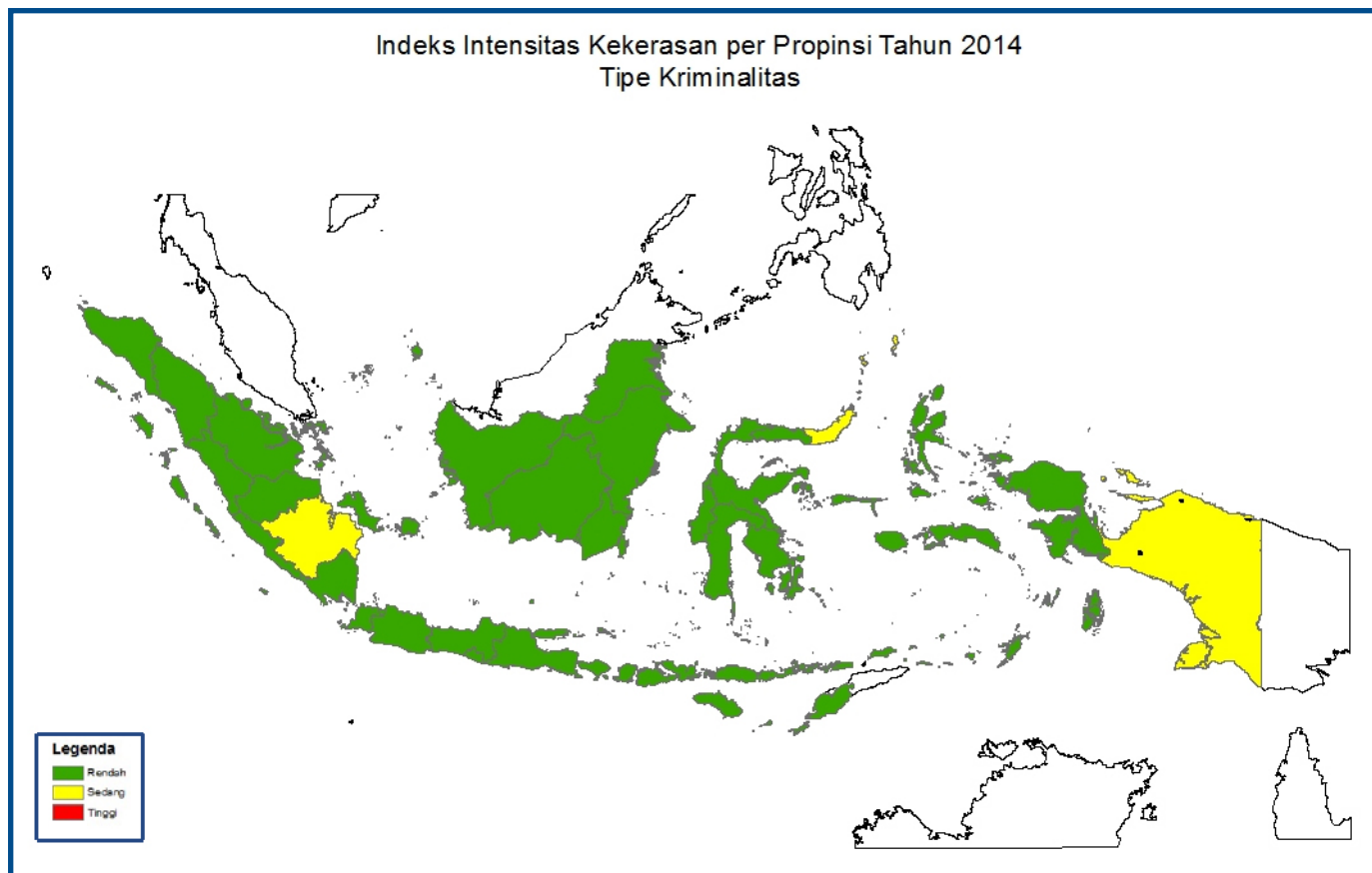
Gambar 10. IIK tipe identitas per propinsi dalam bentuk peta



Gambar 11. IIK tipe Main hakim sendiri per propinsi dalam bentuk peta



Gambar 12. IIK tipe Kekerasan aparat dalam bertugas per propinsi dalam bentuk peta



Gambar 13. IIK tipe Kriminalitas per propinsi dalam bentuk peta



Gambar 14. IIK tipe Separatisme per propinsi dalam bentuk peta

8. Deskripsi nilai IIK

8.1 Deskripsi berdasarkan tipe kekerasan

Untuk keperluan analisis, nilai IIK dapat dilengkapi dengan deskripsi singkat untuk memperoleh gambaran yang lebih dalam. Seperti yang terlihat pada Tabel 7 di atas, pada tahun 2014 Propinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang memiliki nilai IIK tertinggi (19,72). Tingginya angka IIK paling banyak disumbang antara lain dari insiden Kriminalitas, Identitas, dan Main Hakim Sendiri. Berdasarkan lokasi, wilayah yang paling banyak menyumbang pada nilai indeks itu adalah Kota Manado.

Insiden **Kriminalitas** di **Sulawesi Utara** terjadi sebanyak 1.160 kali dan mengakibatkan 74 orang tewas, 844 lainnya terluka, dan merusak 61 bangunan. Sehingga untuk tipe kekerasan ini propinsi Sulawesi Utara memiliki nilai IIK 165.69 dan masuk dalam kategori **Sedang**, jauh di atas propinsi lainnya. Dari semua kabupaten/kota di propinsi ini, **Kota Manado** menyumbang angka IIK kriminalitas tertinggi, yakni 496,24. Angka ini diperoleh karena selama 2014 di Kota Manado terjadi 816 insiden yang menyebabkan 22 orang tewas, 622 terluka, dan merusak 35 bangunan.

Insiden kekerasan terkait isu **sumber daya** paling intensif terjadi **propinsi Maluku** dengan nilai IIK sebesar 5,43 dengan bentuk insiden terbanyak berupa konflik masalah lahan. Kondisi ini memasukkan Maluku dalam kategori **Tinggi** dalam tipe konflik ini. Selama 2014, konflik lahan paling sering terjadi

di **Kabupaten Seram Bagian Barat** sebanyak 5 insiden yang mengakibatkan 9 orang tewas, 98 luka dan 4 bangunan rusak. Berdasarkan data tersebut kabupaten ini memiliki IIK sebesar 5,54, tertinggi diantara kabupaten lain di Maluku Tengah dalam kasus kekerasan terkait sumber daya.

Propinsi Papua Barat memiliki tingkat kekerasan dengan kategori **Sedang** untuk permasalahan **Tatakelola Pemerintahan** (21,12). Terjadi 18 insiden terkait isu ini, dan tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya 6 orang luka dan 24 bangunan rusak. Propinsi ini mencapai IIK tertinggi karena jumlah populasi Papua Barat yang lebih rendah dibandingkan propinsi lain, sehingga setelah dinormalisasi berdasarkan jumlah populasi, maka data jumlah insiden dan dampaknya memberi nilai IIK yang tinggi untuk Papua Barat. Wilayah yang paling intensif adalah **Kabupaten Sorong Selatan** terutama konflik yang terkait dengan program pemerintah. Satu insiden terjadi yang mengakibatkan 13 bangunan rusak.

Terkait **Pemilihan dan Jabatan**, propinsi dengan IIK tertinggi adalah **Propinsi Aceh** (26,79) yang masuk dalam kategori **Tinggi**. Dari 89 insiden yang terjadi selama 2014, yang menimbulkan satu korban jiwa. Dampak yang ditimbulkan berupa 4 orang tewas 33 orang luka dan 30 bangunan rusak. Kejadian yang berakibat kematian tersebut terjadi di wilayah **Aceh Utara**. Di sana, insiden terkait pemilihan terjadi sebanyak 31 kali yang juga mengakibatkan 1 tewas 10 orang luka dan 9 bangunan rusak. Fakta ini memberi nilai IIK sebesar 21,87, tertinggi diantara wilayah lain di Aceh.

Penjelasan lain terkait tipe **Identitas**, pada 2014 **propinsi Sulawesi Selatan** memiliki tingkat intensitas dengan kategori **Sedang**. Selama 2014, terjadi 120 insiden kekerasan yang terkait dengan isu identitas. Dalam 120 insiden tersebut, mengakibatkan 9 tewas, 141 luka, dan 78 bangunan rusak. Lebih jauh, wilayah yang memiliki tingkat kekerasan tertinggi adalah **Makasar**. Wilayah tersebut terjadi 74 insiden selama 2014. Dari jumlah tersebut mengakibatkan 7 orang luka, dan 18 bangunan rusak.

Sementara itu, insiden terkait **main hakim sendiri** paling intensif terjadi di **Propinsi DKI Jakarta** dengan nilai IIK sebesar 23,84 dan masuk dalam kategori **Sedang**. Selama 2014 terjadi 303 insiden dan paling banyak terjadi di wilayah **Jakarta Pusat**, 100 insiden. Dari jumlah tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 137 luka.

Pada tipe **kekerasan aparat dalam bertugas**, propinsi yang memiliki IIK tertinggi adalah **Sumatera Selatan** (5,36) dan memasukkan Sumatera Selatan dalam kategori **Tinggi** untuk tipe konflik ini. Selama 2014, di Jakarta terjadi 257 insiden kekerasan aparat yang menimbulkan 22 korban jiwa dan 294 orang terluka. Wilayah di yang paling intensif tingkat kekerasannya adalah **Kota Palembang**. Di sana terjadi 92 insiden terkait kekerasan aparat yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 114 korban luka.

Tipe kekerasan yang terakhir adalah **separatisme**. Data SNPK menunjukkan selama 2014 insiden kekerasan terkait separatisme hanya terjadi di propinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Insiden terbanyak terjadi di **Papua** yakni 42 kali yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 34, korban luka 37, serta bangunan rusak sebanyak. Lebih jauh, wilayah yang paling banyak insidennya adalah **Kabupaten Puncak Jaya**. Di sana terjadi 14 insiden yang tidak mengakibatkan dampak. Kondisi tersebut menjadikan Puncak Jaya memiliki IIK separatisme tertinggi (6,04) sekaligus memberi Propinsi Papua nilai IIK separatisme sebesar 2,21.

9. Keterbatasan

Beberapa catatan terkait perumusan IIK, yaitu:

- a. Insiden kekerasan dan dampak yang ditimbulkan merupakan fenomena tidak normal (memiliki peluang untuk tidak terjadi/gagal yang lebih besar) sehingga memiliki keterbatasan dalam kemampuan analisa.
- b. IIK bertujuan untuk memberi gambaran atau deskripsi, bukan untuk memprediksi, hal ini mempengaruhi metode yang dipilih

10. Penutup

Tim THC berusaha mengakomodir berbagai masukan yang diperoleh dari berbagai diskusi. Meskipun masih ada hal terkait metodologi yang tidak mampu dipenuhi, semata-mata karena keterbatasan data yang menjadi tulang punggung penyusunan IIK. Selanjutnya, IIK akan disajikan pada berbagai pihak yang merasa adanya manfaat dari IIK ini. Tidak tertutup kemungkinan IIK akan menjadi salah satu komponen atau indikator dalam mengukur kondisi perdamaian khususnya di propinsi-propinsi terkait.

Bibliography

Abasolo, Ever. (n.d). *Estimating Violence Intensity in Bangsamoro: A Conceptual Framework*

Armed Violence Reduction (2014). *Monitoring and Achieving Violence Reduction Goals*.

CIFP. (2010). Preliminary selection of indicators. CIFP.

DFID. (2002). *Conducting conflict assessment: Guidance notes*. Department for International Development.

Heidelberg Institue for International conflict research (2011). *Conflict Barometer 2011*

Institute for Economics & Peace (2014). *Global Peace Index 2014*.

OECD (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide*.

Samarasinghe, S., Donaldson, B., & McGinn, C. (1999). *Conflict Vulnerability Analysis Issues*. Arlington, VA: Tulane Institute for International development.

The Habibie Center. (2011). *National Strategy to Consolidate Peace National Development Priorities and the Need for a Strategy to Consolidate Peace*. Jakarta.

Daftar Jenis dan Tipe Kekerasan

Daftar Jenis dan Tipe Konflik	Keterangan
Konflik Sumber Daya	Tindakan kekerasan dipicu oleh sengketa sumber daya (lahan, tambang, akses pekerjaan, gaji, polusi dll)
Sumber daya lainnya	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah sumber daya selain yang ada di daftar NVMS
Masalah lahan	Tindakan kekerasan dipicu oleh lahan (milik umum atau privat)
Masalah sumber daya alam	Tindakan kekerasan dipicu oleh sumber daya alam (milik umum atau privat misalnya tambang)
Sumber daya buatan manusia (milik umum atau privat)	Tindakan kekerasan dipicu oleh sumber daya buatan manusia (milik umum atau privat)
Akses	Tindakan kekerasan dipicu oleh akses terhadap pekerjaan, pasaran, rute/jalur, pelanggan, dsb.
Lingkungan	Tindakan kekerasan dipicu oleh kerusakan lingkungan, polusi udara, polusi suara/kebisingan
Gaji/upah/perburuan	Tindakan kekerasan dipicu oleh komplain terhadap upah, kondisi ketenagakerjaan, hubungan buruh dengan manajemen, dll)
Konflik Tata Kelola Pemerintah	Tindakan kekerasan dipicu oleh kebijakan atau program pemerintah (pelayanan publik, korupsi, subsidi, pemekaran dll)
Tata kelola pemerintahan lainnya	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah tata kelola pemerintahan selain yang ada di daftar NVMS
Tender	Tindakan kekerasan dipicu oleh persoalan terkait dengan tender termasuk korupsi dalam proses tender
Korupsi	Tindakan kekerasan dipicu oleh korupsi atau penyalahgunaan dana milik pemerintah tidak terkait dengan persoalan tender
Pelayanan publik	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, yang disediakan oleh pemerintah)
Harga komoditas/ subsidi	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait harga komoditas atau subsidi
Program pemerintah	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah terkait program pemerintah SELAIN TENDER, KORUPSI, PELAYANAN PUBLIK, SERTA HARGA KOMODITAS DAN SUBSIDI. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan program pemerintah, prioritas pendanaan dan komplain/ pengaduan tentang pelaksanaan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, masalah gaji dan pegawai pemerintah.
Pemekaran wilayah	Tindakan kekerasan dipicu oleh pemekaran wilayah atau batas wilayah
Penegakan hukum	Tindakan kekerasan dipicu oleh penangkapan, masalah yang berkaitan dengan tindakan aparat keamanan, atau ketidakpuasan terhadap jalannya/keputusan pengadilan
Konflik Pemilihan dan Jabatan	Tindakan kekerasan dipicu oleh persaingan antara dua pihak berkaitan dengan pemilihan atau jabatan
Pemilihan dan jabatan lain	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah pemilihan/jabatan selain yang ada di daftar NVMS
Pemilihan/jabatan nasional	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan tingkat nasional (misalnya: pemilihan umum, tuntutan mundur terhadap anggota MPR/DPR, Presiden atau Wakil Presiden)
Pemilihan/jabatan propinsi	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat propinsi (misalnya: pilkada tingkat propinsi, tuntutan mundur terhadap pejabat tingkat propinsi/gubernur)
Pemilihan/Jabatan kabupaten/kota	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota (Pilkada dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota tuntutan mundur terhadap pejabat tingkat kabupaten/kota misalnya bupati/walikota)

Jabatan kecamatan	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat kecamatan (misalnya: perselisihan atas jabatan camat)
Pemilihan/Jabatan desa/ kelurahan	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pemerintahan di tingkat desa/ kelurahan (misalnya: Pilkada, pemilihan BPD, posisi/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik)
Jabatan pemerintah lain	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan pegawai pemerintah di tingkat selain tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa
Jabatan/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik	Tindakan kekerasan dipicu oleh jabatan/pengaruh/kekuasaan di dalam partai politik
Konflik Separatisme	Tindakan kekerasan yang dipicu oleh upaya pemisahan dari NKRI
Separatisme	Tindakan kekerasan dipicu oleh perjuangan untuk kemerdekaan/pemisahan dari NKRI
Konflik Identitas	Tindakan kekerasan dipicu oleh identitas kelompok (agama, etnis, suku dll)
Identitas Lainnya	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah identitas selain yang ada di daftar NVMS
Antar etnis/antar suku	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu etnis/suku (misalnya: perselisihan atas atribut dan simbol kultural perantau/transmigran, bahasa dan sebagainya)
Antar agama	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang melibatkan dua pemeluk agama berbeda
Intra agama	Tindakan kekerasan dipicu oleh su-isu di dalam satu agama (misalnya: antar-sekte atau aliran yang berbeda)
Antara migran/pengungsi dengan lokal	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang terkait migrasi/perantauan/pengungsi
Antara migran/pengungsi dengan lokal dan etnis tertentu	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu yang terkait migrasi/perantauan/pengungsi maupun etnisitas/kesukuan
Geografis	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah antarkampung yang sudah lama terjadi
Gender	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu terkait gender
Identitas Olahraga	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu antar pendukung tim/klub olahraga
Identitas sekolah/universitas	Tindakan kekerasan dipicu oleh isu-isu antar pelajar dari sekolah/fakultas/universitas (misalnya: tawuran antar sekolah)
Konflik Main Hakim Sendiri	Tindakan kekerasan dipicu oleh masalah belas dendam (tersinggung, pencurian, hutang, kecelakaan dll)
Main hakim sendiri lainnya	Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas isu selain yang ada di daftar NVMS
Pembalasan atas penghinaan	Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas penghinaan/rasa malu/kehilangan muka/tersinggung
Pembalasan atas kecelakaan	Kekerasan dilakukan untuk membalas dendam atas kecelakaan lalu lintas (misalnya tabrakan, tabrak lari)
Pembalasan atas hutang	Kekerasan dilakukan untuk menagih/menyelesaikan masalah hutang-piutang
Pembalasan atas pencurian	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pencurian/penipuan yang berakibat kerugian uang
Pembalasan atas pengrusakan	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pengrusakan harta benda
Melawan/membalas perselingkuhan	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku selingkuh/zina
Pembalasan atas penganiayaan	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku pembunuhan/penganiayaan/pemukulan/pemeriksaan
Melawan tempat maksiat	Kekerasan dilakukan untuk menghukum pelaku atau merazia tempat perjudian/mabuk-mabukan/narkoba/pelacuran
Melawan santet	Kekerasan dilakukan untuk menghukum/membalas santet/ilmu hitam
Konflik Lainnya	Tipe kekerasan lainnya
Tidak jelas	Pemicu konflik kekerasan belum jelas

Tipe kekerasan lainnya	Tindakan kekerasan yang dipicu oleh masalah selain yang ada di daftar NVMS
Kekerasan Aparat dalam Bertugas	Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka
Kriminalitas	Tindakan kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu.
KDRT	Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah

Indeks Intensitas Kekerasan per Propinsi
Tahun 2014



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Sumber Daya



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Tata Kelola Pemerintahan



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Pemilihan dan Jabatan



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Identitas



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Main Hakim Sendiri



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Kekerasan Aparat dalam Bertugas



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Kriminalitas



Indeks Intensitas Kekerasan per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Tipe Separatisme





The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non-pemerintah dan non-profit sejak tahun 1999. Visi The Habibie Center adalah menciptakan masyarakat demokratis secara struktural berdasarkan moralitas dan integritas nilai-nilai budaya dan agama. Misi The Habibie Center adalah **pertama**, untuk mendirikan masyarakat demokratis secara struktural dan kultural yang mengakui, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia, melakukan studi dan advokasi isu-isu tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan **kedua**, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan sosialisasi teknologi.

Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)
The Habibie Center (THC)

PROJECT SUPERVISOR:

Rahimah Abdulrahim (Direktur Eksekutif The Habibie Center)
Hadi Kuntjara (Deputi Operasional The Habibie Center)

TIM PENELITI:

Imron Rasyid
M. Hasan Ansori
Rudi Sukandar
Sopar Peranto
Fathun Karib
Sofyan Cholid
Johari Efendi
N. Vidya Hutagalung
R. Praditya Andika Putra

Desain dan Layout: M. I. Qeis
Rahma Simamora

SNPK-THC 2014
The Habibie Center building
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta Selatan 12560
Telp. 62 21 780 8125 / 62 21 781 7211
Fax. 62 21 780 8125 / 62 21 781 7212
E-mail: nvms@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id

PUBLIKASI KAMI



TIM SNPK THC
 Mohammad Hasan Ansori
 Rudi Sukandar
 Sopar Peranto
 Fathun Karib
 Sofyan Cholid
 Imron Rasaid



SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN (SNPK)
THE HABIBIE CENTER (THC)

SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN (SNPK)
THE HABIBIE CENTER (THC)

TIM PENELITIAN
MOHAMMAD HASAN ANSORI, R. PRADITYA ANDIKA PUTRA, JOHARI EFE
IMRON RASYID, SOFYAN CHOLID, FATHUN KARIR

 KAJIAN PERDAMAIAN THE HABIBIE CENTER	 KAJIAN PERDAMAIAN THE HABIBIE CENTER	 KAJIAN PERDAMAIAN DAN KEBIJAKAN THE HABIBIE CENTER Edisi 08/November 2014
---	---	--

A painting by Wang Meng titled 'A Mountain Villa in the Rain' (Shan Shu Yu). It depicts a rainy scene with a pavilion, a figure, and a mountain. The style is expressive, with visible brushstrokes and a muted color palette dominated by greys, browns, and a touch of red.

A large banner with the text "STOP CAMPAN LUTAN" in blue and red letters. The banner is covered with many colorful handprints in red, green, yellow, and blue. The banner is being held up by people, and a person's hand is visible in the foreground.

A group of men, likely Indonesian officials or military personnel, are standing in a line and saluting. They are wearing blue batik shirts, black trousers, and black peci hats. The background shows a building and some greenery.

 Catatan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia	 Kajian Permadaman dan Kebijakan The Habitable Center	 Kajian Permadaman dan Kebijakan The Habitable Center	 Kajian Permadaman dan Kebijakan The Habitable Center	 Kajian Permadaman dan Kebijakan The Habitable Center	 Kajian Permadaman dan Kebijakan The Habitable Center
Peta Kelelahan di Indonesia (Januari-April 2012) IRISANAN ISU Peta persebaran kelelahan di 343 wilayah di 34 provinsi yang menggambarkan 320 kasus, 2.044 keluhan, dan 1.000 keluhan yang berkaitan dengan kelelahan. Peta persebaran kelelahan ini menunjukkan bahwa kelelahan tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kelelahan yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.	Peta Kelelahan di Indonesia (Maret-Agustus 2012) IRISANAN ISU Peta persebaran kelelahan di 343 wilayah di 34 provinsi yang menggambarkan 320 kasus, 2.044 keluhan, dan 1.000 keluhan yang berkaitan dengan kelelahan. Peta persebaran kelelahan ini menunjukkan bahwa kelelahan tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kelelahan yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.	Peta Kelelahan di Indonesia (September-Desember 2012) IRISANAN ISU Peta persebaran kelelahan di 343 wilayah di 34 provinsi yang menggambarkan 320 kasus, 2.044 keluhan, dan 1.000 keluhan yang berkaitan dengan kelelahan. Peta persebaran kelelahan ini menunjukkan bahwa kelelahan tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kelelahan yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.	Peta Kelelahan di Indonesia (Januari-April 2013) IRISANAN ISU Peta persebaran kelelahan di 343 wilayah di 34 provinsi yang menggambarkan 320 kasus, 2.044 keluhan, dan 1.000 keluhan yang berkaitan dengan kelelahan. Peta persebaran kelelahan ini menunjukkan bahwa kelelahan tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kelelahan yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.	Peta Kelelahan di Indonesia (Maret-Agustus 2013) IRISANAN ISU Peta persebaran kelelahan di 343 wilayah di 34 provinsi yang menggambarkan 320 kasus, 2.044 keluhan, dan 1.000 keluhan yang berkaitan dengan kelelahan. Peta persebaran kelelahan ini menunjukkan bahwa kelelahan tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kelelahan yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.	Peta Kelelahan di Indonesia (September-Desember 2013) IRISANAN ISU Peta persebaran kelelahan di 343 wilayah di 34 provinsi yang menggambarkan 320 kasus, 2.044 keluhan, dan 1.000 keluhan yang berkaitan dengan kelelahan. Peta persebaran kelelahan ini menunjukkan bahwa kelelahan tersebar di seluruh Indonesia, dengan tingkat kelelahan yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.